

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM

Aizah Dien Putri Ambarizki¹, Totok Minto Laksono²
Universitas Hang Tuah Surabaya¹, Universitas Kediri²
aizahdien14@gmail.com¹, totokminto.shmh@gmail.com²
Correspondence Author: totokminto.shmh@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted
4 September 2023
Reviewed
17 September 2023
Accepted
26 September 2023
Published
30 Maret 2024

Negara menjadi sebuah wadah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik dan menjaga kedamaian sosial. Negara Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik dan sistemnya sendiri dalam menjalankan roda kehidupan, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mendeskripsikan sistem administrasi negara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari artikel jurnal, literatur, media massa online, dan Internet. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang

pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dari sistem administrasi negara Indonesia dengan Brunei Darussalam, mulai dari bentuk pemerintahan Indonesia berbentuk Republik sedangkan Brunei Darussalam berbentuk Monarki Absolut. Kepala negara Indonesia adalah presiden sedangkan Brunei Darussalam yaitu Sultan. Pada profil negara yang meliputi letak geografis, demografi, ekonomi, dan akuntansi, kemudian sistem pemerintahan, dan birokrasi terdapat juga perbedaan. Perbandingan tersebut nantinya diharapkan akan bermanfaat untuk pengembangan konsep dan teori Sistem Administrasi Negara.

Kata Kunci: Sistem, Administrasi, Indonesia, dan Brunei Darussalam

ABSTRACT

The state is a place where people can live their lives well and maintain social peace. Indonesia and Brunei Darussalam have their own characteristics and systems in running the wheels of life, of course there are differences in terms of social, economic and political aspects. This research aims to compare and describe the state administration system of Indonesia and Brunei Darussalam. The research was conducted using a qualitative method that is a library study (library research). Data sources come from journal articles, literature, online mass media, and the Internet. The data collection technique in this research is documentation, through written relics mainly in the form of archives and including books on opinions, theories, arguments, concepts, or laws related to research problems. The results showed that there are differences and similarities between the Indonesian and Brunei Darussalam state administration systems, starting from the Indonesian form of government in the form of a Republic while Brunei Darussalam is in the form of an Absolute Monarchy. The head of state of Indonesia is the president while Brunei Darussalam is the Sultan. In the country's profile which includes geographical location, demographics, economy, and accounting, then the government system, and bureaucracy there are also differences. The comparison is expected to be useful for the development of concepts and theories of the State Administration System.

Keywords: System, Administration, Indonesia, and Brunei Darussalam

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah dengan kekuasaan hukum tertinggi dan diakui oleh rakyatnya, yang terbagi menjadi beberapa unsur yaitu adanya wilayah, pemerintahan, rakyat dan pengakuan kedaulatan. Sedangkan administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diputuskan bersama. Kemudian, perbandingan adalah dua atau lebih yang dibandingkan dengan hal lain. Keberadaan sebuah institusi yang bernama negara menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan sebuah perangkat yang menjadi sebuah ikatan kebersamaan dalam kontrak sosial antar manusia. Dengan adanya sebuah negara diharapkan menjadi sebuah wadah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga kedamaian sosial.

Sistem administrasi negara (Sistem Public Administration) adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan dalam suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Dari uraian di atas, tentu setiap negara memiliki karakteristik dan sistem yang berbeda-beda. Oleh karena itu, artikel ini disusun guna mendeskripsikan dan mengetahui perbandingan dari sistem administrasi serta birokrasi negara Indonesia dengan Brunei Darussalam.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30). Sedangkan penentuan sumber data berasal dari artikel jurnal, media massa, berita, internet. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998: 49).

HASIL

Bentuk Negara Indonesia Dengan Negara Brunei Darussalam

Negara Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan Pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, diartikan sistem dimana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan sebagai daerah otonom. Sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu Republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja atau ratu melainkan seorang presiden yang memegang pemerintahan melalui pemilihan umum.

Negara Brunei Darussalam

Bentuk Negara dari Brunei Darussalam ialah kesultanan konstitusional namun secara garis besar bentuk negaranya ialah Kesatuan, yang mana Negara ini termasuk dalam 4 distrik administratif (disebut daerah). Setiap distrik dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Setiap Daerah dibagi lagi ke dalam subdistrik (disebut Mukim) yang setiapnya dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan disebut Penghulu. Setiap Mukim dibagi lagi ke dalam desa (disebut Kampong) dipimpin Ketua Kampong yang dipilih langsung oleh masyarakat secara luber, dan efektif jika yang terpilih disetujui oleh Pemerintah. negara ini terdiri atas dua bagian yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Monarki Absolut, dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Profil Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam

Negara Indonesia

a. Posisi Geografis

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 275,77 juta jiwa. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

b. Demografi

Penduduk Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu, sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak. Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah Etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke nusantara dengan jalur perdagangan sejak abad ke 8 SM dan menetap menjadi bagian dari Nusantara.

Di Indonesia terdapat sekitar 3% populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930-an terakhir kalinya pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%); Katolik (3%); Hindu (1,8%); Buddha (0,8%); dan lain-lain (0,3%). Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di Negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.

c. Ekonomi

Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu. Ekonominya kini telah lumayan stabil saat ini. Kondisi wilayah negara Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia menyebabkan corak pada keadaan sosial ekonomi penduduk negara Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

penduduk Indonesia, yaitu:

- Negara Indonesia merupakan suatu negara agraris, di mana kurang lebih 70% penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Bentuk dari kegiatan pertanian negara Indonesia, yaitu sawah (terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan, lebak, dan bencah); ladang atau huma; tegalan; dan kebun.
- Merupakan suatu usaha dari rakyat, pemerintah, dan swasta dalam menanam tumbuhan untuk bahan mentah di industri dan barang ekspor.
- Peternakan yang ada di negara Indonesia, terdiri dari peternakan hewan besar (antara lain sapi, lembu, dan kuda), peternakan hewan kecil (antara lain kambing, kelinci, dan babi), dan peternakan hewan unggas (antara lain burung, itik, dan ayam).
- Perikanan darat dan perikanan laut.
- Kehutanan
- Pertambangan, terdiri dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran.
- Perindustrian, terdiri dari industri kecil, industri sedang, dan industri besar.
- Sektor pertanian menjadi sektor utama dalam kegiatan ekonomi penduduk di negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara agraris.
- Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas. Indonesia adalah pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah- rempah dan karet.
- Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan negara- negara tetangganya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.

d. Akuntansi

Indonesia mengikuti standard akuntansi yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Sistem akuntansi ini diangkat dari standar keuangan sesuai dengan International Accounting Standards Board (IASB). Kegiatan ekspor dan impor yang semakin kompleks, dan juga semakin berkembangnya perusahaan asing di Indonesia, menyebabkan standar PSAK saat ini hendak dipersatukan. Tujuannya membuat standar akuntansi di Indonesia serupa dengan standar akuntansi di dunia internasional (Zsazya, 2020). Indonesia telah menggunakan International Financial reporting standards (IFRS) untuk penulisan laporan keuangannya. IFRS telah menjadi patokan dasar untuk menyamakan pembuatan laporan keuangan dunia. IFRS juga telah diterapkan oleh berbagai negara maju serta berkembang. Dengan adanya IFRS, sistem pencatatan laporan keuangan akan serupa dengan negara lain, dan hal ini juga tentu memudahkan pencatatan laporan keuangan perusahaan asing di Indonesia. IAI yang berdiri sejak 23 Desember 1957, bertindak sebagai badan pengaturan dan pembinaan akuntansi di Indonesia dengan pengawasan Departemen Keuangan. Penyusunan SAK dan SPAP dilakukan oleh pihak IAI. Dulunya, sistem tata buku Belanda digunakan oleh Indonesia. Kemudian, setelah kemerdekaan menggunakan pola Amerika tahun 2005. Sejak Januari 1995, standar IASC mulai berlaku dan telah tertulis dalam PSAK (Zsazya, 2020).

Negara Brunei Darussalam

a. Posisi Geografis

Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan; 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 383.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 46.000 orang tinggal di ibukota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini.

Brunei Darussalam terletak di Pantai Kalimantan Barat Laut, hanya berbatasan dengan satu negara saja, yaitu Malaysia, di negara bagian Serawak atau terletak antara 5°LU – 4°LS dan 114°BT – 115°30'BT.

Keseluruhan pantai menghadap laut Cina Selatan yang panjangnya sekitar 161 km. Serawak membagi Brunei menjadi dua bagian yaitu bagian barat dan bagian timur. Negara Brunei Darussalam terbagi atas dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei, sedangkan bagian timurnya adalah daerah Temburong. Luas wilayah seluruhnya adalah 5,765 km², hampir sama dengan luas Pulau Bali di Indonesia (5.561 km²). Brunei mempunyai batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
2. Sebelah timur berbatasan dengan Sabah, Malaysia
3. Sebelah barat berbatasan dengan Serawak, Malaysia

b. Demografi

Pada umumnya penduduk bertempat tinggal di kota-kota sepanjang pantai Laut Cina Selatan. Mereka terdiri atas orang Melayu sebanyak 50%, Cina sebanyak 18%, orang Kedayan yang diperkirakan berasal dari Jawa dan Sumatera sebanyak 16%, sisanya adalah orang Kedayan dan orang Dayak. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah bahasa Melayu. Agama resminya adalah agama Islam.

Negara Brunei Darussalam adalah negara mungil yang sangat kaya akan minyak, terletak di pantai barat laut Pulau Kalimantan. Bagian Barat merupakan dataran pantai yang berawa sedangkan bagian Timur berbukit. Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu: distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah Ibu Kota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Mesjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia. Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Rangu yang terletak di tengah sungai dekat Istana Nurul Iman, merupakan habitat beragam monyet khas Kalimantan.

c. Ekonomi

Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan mempengaruhi perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000. Rancangan-rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan keterampilan tenaga buruh, pengurangan pengangguran, penguatan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum, peluasan lagi asas ekonominya. Sistem Penerbangan Brunei Diraja, sistem penerbangan negara, sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia/Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.

Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

1) Potensi Alam

- a) Kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya.
- b) Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar.
- c) Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar.

2) Potensi Pariwisata

Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah yang disebut dengan Kota Air dan

istana kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya.

3) Potensi Industri

Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai.

4) Potensi Sosial Budaya

Penduduk Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, penduduknya ada yang berbahasa Mandarin dan Inggris.

5) Sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, kelapa, dan sagu.

6) Sektor perkebunan menghasilkan karet, kelapa sawit, dan lada.

7) Sektor pertambangan menghasilkan minyak dan gas bumi.

Sumber ekonomi utamanya diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi, yaitu mencapai 76% dari pendapatan negara. Minyak bumi merupakan komoditi ekspor tertinggi yaitu 99% dari seluruh ekspor Brunei.

8) Sektor Perhubungan

Untuk perhubungan dibangun transportasi melalui darat, laut, dan udara. Jaringan jalan raya masih terbatas (1.250 km) dan jalan kereta api hanya sepanjang 10 km. Untuk menghubungkan dengan luar negeri dibangun bandar udara internasional Bandar Seri Begawan dan Pelabuhan Samudra di muara Sungai Brunei.

9) Sektor Perdagangan

Ekspor Brunei berupa minyak bumi dan gas alam, kayu serta karet. Negeri ini mengimpor 80% bahan makanan, tekstil, mesin-mesin pertanian dan alat transportasi dari negara lain. Karena itu, dalam jangka panjang Brunei akan berusaha dapat melakukan swasembada pangan.

10) Sektor Kehutanan

Hasil hutan yang bisa diandalkan Brunei adalah kayu, rotan, cengal, dan damar.

d. Akuntansi

Brunei Darussalam Accounting Standards-Non Public Interest Entities (BDASNONPIE). Untuk entitas yang memenuhi syarat berdasarkan kerangka kerja NON-PIE untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan BDAS NON-PIE, satu set lengkap laporan keuangan terpisah untuk entitas tersebut mencakup neraca, laporan laba rugi, kebijakan akuntansi dan catatan penjelasan, laporan arus kas. BDAS NON-PIE tidak digunakan dalam pembuatan serta penyajian laporan keuangan konsolidasian (BDASC, 2020). Setiap item material harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Aset dan kewajiban biasanya tidak boleh saling hapus dalam laporan keuangan. Komparatif informasi harus dimasukkan dalam informasi narasi dan deskripsi pada saat itu berhubungan dengan pengertian mengenai laporan keuangan masa sekarang. Namun, beberapa penggantian kerugian diperlukan atau diizinkan dalam keadaan luar biasa, seperti diamanatkan oleh BDAS NON-PIE. Pengimbangan juga dapat terjadi di mana keuntungan, kerugian dan biaya terkait yang timbul dari transaksi yang sama atau serupa tidak material. Brunei menggunakan dua jenis standar akuntansi dimana yang pertama adalah standar yang diadopsi oleh Brunei yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. IFRS dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dan digunakan oleh perusahaan yang memiliki kepentingan publik di Brunei. Standar akuntansi kedua adalah Standar Akuntansi Brunei Darussalam (BDAS) yang dikeluarkan oleh BDASC dan berlaku di Brunei mulai dari tanggal 1 Januari 2018.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan Brunei Darussalam

Negara Indonesia

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amendemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amendemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Presiden Joko Widodo yang diusung oleh PDIP menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amendemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut Ideologi Pancasila dan mempunyai beragam suku dan agama. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut:

- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka
- Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
- Lembaga tertinggi adalah MPR
- Presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintah negara di bawah MPR
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
- Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
- Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

Negara Brunei Darussalam

Sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang bersendikan pada ajaran Islam, dengan kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan sultan. Negara Brunei Darussalam Menganut sistem pemerintahan Presidensial dengan peran Raja yang dominan. Konstitusi Brunei merupakan penggabungan dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Westminster/Inggris. Konsep Pemerintahan Melayu Brunei menekankan pada kepemimpinan yang otokratik, ketuhanan dan absolutisme kuasa sultan, namun masih mempersilahkan seluruh warganya untuk tetap berpartisipasi, hal inilah yang disebut dengan “Living Democracy”.

Di bawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah Dewan Negara dipilih atau Majelis Masyuarat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, pada tahun 1962. Setelah pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970 Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tanggal 13 Februari 1984, Dewan Negara dibubarkan oleh Sultan. Majelis Mesyuarat Negara Brunei didirikan kembali dengan sistem lama pada tanggal 25 September 2004. Majelis itu dibubarkan pada tanggal 1 September 2005 dan didirikan kembali pada tanggal 2 September 2005 sesuai dengan ketentuan baru pada Konstitusi Brunei yang telah diamendemen tahun 2005. Manajemen Majelis Negara Brunei dikelola oleh Panitia Majelis Negara Brunei untuk membantu dan menyarankan Ketua Majelis dalam hal mengatur rapat sesuai dengan aturan rapat. Panitia dan Wakil Panitia mempunyai peran yang sama seperti para Anggota Majelis. Pengelolaan Majelis didukung sepenuhnya oleh seluruh Pejabat dan staf dari Departemen Dewan Negara. Rapat majelis terbuka untuk umum, dan masyarakat dapat melihat sidang majelis dan mengamati mereka bersidang.

Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Dimana kekuasaan eksekutif sultan sekaligus perdana mentri hassanal bolkiaah yang menjabat sejak 5 oktober 1967, sultan adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan

kekuasaan legislatif bersifat unikamellar yaitu oleh majlis masyuarat negeri yang hanya bertindak sebagai lembaga konsultatif sultan. Lalu untuk kekuasaan yudikatif sendiri berada pada supreme count yang berarti pimpinan dan para hakim diangkat sumpah oleh sultan untuk menjabat 3 tahun. Segala urusan kenegaraan dijalankan oleh Sultan. Namun dalam proses pelaksanaan roda pemerintahan Sultan tidaklah bekerja sendiri, namun sultan dibantu oleh penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara.

Sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep “Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”. Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki 6 kedudukan:

1. Raja sebagai payung Allah di muka bumi
2. Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam
3. Raja sebagai kepala negara
4. Raja adalah kepala pemerintahan
5. Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat
6. Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Sistem lain keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah, membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekat) dan 'zina (seks ilegal) di kalangan Muslim.

Birokrasi Negara Indonesia dan Brunei Darussalam

Negara Indonesia

Birokrasi di Indonesia adalah Lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun daerah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 dan sesuai dengan budaya Indonesia. Namun, birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat.

Dalam proses rekrutmen ASN, untuk mengurangi tindakan penyalahgunaan kewenangan yang berbau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka saat ini dalam proses rekrutmen menggunakan sistem tes CAT agar mendapatkan calon peserta yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang memadai. Tidak hanya itu saja, cara rekrutmen dengan menggunakan tes CAT ini lebih efisien dan efektif baik ditinjau dari segi waktu dan biayanya, serta tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia atau panitia penyelenggara. Dengan demikian hasil yang kita harapkan akan dapat terwujud dalam mencari calon PNS yang berkualitas, yang nantinya akan mengisi jabatan di beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Negara Brunei Darussalam

Birokrasi keagamaan Brunei mempertahankan monopoli mutlak atas komunikasi- publik yang berkaitan dengan Islam. Tidak ada kelompok sekuler terorganisir atau kelompok Islam oposisi yang pernah secara terbuka menentang pendapat keagamaan yang dikemukakan oleh pemerintah pasca-kolonial. Pembuatan-kebijakan Islam hanya terjadi di antara para pejabat negara, dan di balik pintu tertutup. Organisasi-organisasi Islam non-negara, cendekiawan agama yang independen (ulama), atau

penerbitan Islam yang “liar”, secara umum tidak ada. Ulama Brunei adalah, menurut definisi, pegawai negeri sipil.

Pada negara Brunei Darussalam, cara pemilihan birokrat dilakukan dengan sistem rekrutmen tertutup. Artinya, rekrutmen dilakukan oleh para elit politik yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya. Sehingga, prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang. Negara Brunei Darussalam rakyatnya mempercayai sepenuhnya pada kepada pihak kerajaan dalam pelaksanaan sistem rekrutmen tertutup.

DISKUSI

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan & perbedaan dari negara Indonesia dengan Brunei Darussalam yaitu sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Brunei Darussalam

Perbandingan	Persamaan		Perbedaan	
	Indonesia	Brunei Darussalam	Indonesia	Brunei Darussalam
Bentuk Negara	Kesatuan	Kesatuan	-	-
Bentuk Pemerintah	-	-	Republik	Monarki Absolut
Sistem Pemerintah	-	-	Presidensial	Presidensial dengan peran Raja yang dominan
Kepala Negara	-	-	Presiden	Sultan
Lembaga Negara	-	-	1. Lembaga legislatif (MPR, DPR, dan DPD). 2. Lembaga eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri) 3. Lembaga yudikatif (MA, MK, KY)	1. Kekuasaan eksekutif (Sultan) 2. Kekuasaan legislatif bersifat unikameral (Majlis masyuarat negeri) yang hanya bertindak sebagai lembaga konsultatif sultan 3. Kekuasaan yudikatif sendiri berada pada supreme count yang berarti pimpinan dan para hakim.
Kategori Negara	-	-	Berkembang	Maju
Hukum Negara	-	-	Hukum Nasional	Hukum Syariah
Falsafah Negara	-	-	Pancasila	Melayu Islam Beraja (MIB)

Birokrasi Negara	-	-	Sesuai UUD 1945 dan budaya Indonesia.	Monopoli mutlak atas komunikasi-publik yang berkaitan dengan Islam.
Rekrutmen Birokrasi	-	-	Sistem Rekrutmen Tertutup	Sistem tes CAT
Akuntansi	-	-	IFRS	IFRS dan BDAS

Keterangan:

1. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan Presidensial, dan mempunyai beragam suku dan agama. Sedangkan Brunei Darussalam adalah negara kesatuan Islam dengan corak pemerintahan Monarki Absolut.
2. Kepala negara Indonesia adalah presiden. Dalam pemilihan legislatif dan eksekutif dipilih dengan pemilihan umum yang diadakan dalam lima tahun sekali. Sedangkan Brunei Darussalam mutlak segala pemerintahan dan kepala negara adalah ditangan Sultan, karena parlemen hanya ditunjuk langsung oleh Sultan maka pemerintahanya dikendalikan langsung oleh Sultan (raja) dimana hanya garis keturunan saja yang berhak mengganti dan suksesi hanya oleh raja (sultan) dan untuk keluarga sultan saja yang berhak mengganti kedudukan pemerintahan dan kepala negara tersebut.
3. Negara Indonesia memiliki lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga eksekutif terdiri Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Lalu lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, KY. Sedangkan Brunei Darussalam memiliki sultan sebagai kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif bersifat unikameral yaitu Majelis masyuarat negeri yang hanya bertindak sebagai lembaga konsultatif sultan, dan kekuasaan yudikatif sendiri berada pada supreme count yang berarti pimpinan dan para hakim.
4. Brunei Darussalam termasuk dalam negara maju sedangkan Indonesia adalah negara berkembang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah yang besar dan dipisahkan lautan, sedangkan Brunei Darussalam bukan negara kepulauan, wilayahnya kecil dan tidak dipisahkan lautan.
5. Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam namun tidak memberlakukan hukum syariah sebagai hukum nasional. Sedangkan Brunei Darussalam adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam dengan hukum syariah sebagai hukum nasional.
6. Falsafah negara Indonesia adalah Pancasila, sedangkan Brunei Darussalam yaitu Melayu Islam Beraja (MIB). Bahasa resmi negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia, sedangkan Brunei Darussalam yaitu Bahasa Melayu.
7. Birokrasi di Indonesia menjalankan tugas pelayanan publik baik dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 dan sesuai dengan budaya Indonesia. Sedangkan Brunei Darussalam mempertahankan monopoli mutlak atas komunikasi- publik yang berkaitan dengan Islam.
8. Birokrasi di Indonesia pada saat rekrutmen pegawai, dilakukan melalui sistem tes CAT untuk mendapatkan calon peserta yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang memadai. Sedangkan Brunei Darussalam, dalam proses rekrutmen dilakukan secara sistem tertutup.
9. Indonesia telah menggunakan International Financial reporting standards (IFRS) untuk penulisan laporan keuangannya. Sedangkan Brunei Darussalam Brunei menggunakan dua jenis standar akuntansi, pertama adalah standar yang diadopsi oleh Brunei yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. IFRS dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dan digunakan oleh perusahaan yang memiliki kepentingan publik di Brunei. Standar akuntansi kedua adalah Standar Akuntansi Brunei

Darussalam (BDAS) yang dikeluarkan oleh BDASC dan berlaku di Brunei mulai dari tanggal 1 Januari 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia dengan Brunei Darussalam memiliki sistem administrasi negara yang berbeda dengan negara Indonesia. Mulai dari bentuk negara dan pemerintahan, profil negara, sistem pemerintahan, serta birokrasi. Perbandingan kedua negara tersebut, terlihat jelas pada bentuk pemerintahan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Indonesia dipimpin oleh presiden, sedangkan Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang Raja atau Sultan. Perbandingan sistem administrasi negara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori Sistem Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ahmad. 2016. "*Makalah Administrasi Publik-Perbandingan Negara Indonesia dan Brunei Darussalam*". <http://ahmadarifin7676.blogspot.com/2016/12/makalah-administrasi-publik.html> (diakses pada tanggal 15 April 2023).
- Dominik M. Müller. 2017. "*Wewenang Islam dan Negara di Brunei Darussalam*". <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/wewenang-islam-dan-negara-di-brunei-darussalam/> (diakses pada tanggal 28 April 2023).
- Hamzah, Ansori. "Makalah SANRI". <https://www.scribd.com/doc/147306593/MAKALAH-SANRI> (diakses pada tanggal 14 Maret 2023).
- Natalis Christian, dkk. 2021. "PERKEMBANGAN AKUNTANSI BRUNEI DARUSSALAM DAN ANALISIS SHENANIGANS DALAM LAPORAN KEUANGANNYA". <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3017> (diakses 2 Mei 2023).